



Penjabat DKI I Idaman Dewan dan Rakyat

Helena F Nababan

Masa jabatan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria akan berakhir pada 16 Oktober 2022. Sesuai amanat surat Menteri Dalam Negeri, DPRD DKI Jakarta sudah menyelesaikan tugas membahas dan mengusulkan tiga nama calon penjabat gubernur DKI Jakarta.

Melalui rapat pimpinan gabungan yang berlangsung Selasa (13/9/2022), disepakati tiga usulan calon penjabat gubernur DKI, yaitu Heru Budi Hartono yang kini menjabat Kepala Sekretariat Presiden, Sekdaprov DKI Jakarta Marullah Matali, serta Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Bahtiar.

Ketiga nama itu sudah dikirimkan ke Kemendagri oleh Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi. Nama-nama itu akan dibahas bersama dengan tiga nama lain usulan Kemendagri. Presiden nanti akan memutuskan penjabat terpilih.

Prasetyo Edi Marsudi mengatakan, ketiga nama itu putra-putra terbaik yang memahami permasalahan Jakarta. Mereka juga dekat dengan Presiden Joko Widodo.

Namun yang terpenting, seperti yang disampaikan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Rani Mauliani, dewan berharap sosok terpilih yang paham Jakarta bisa bekerja sama dengan dewan, profesional, kooperatif, dan komunikatif dengan dewan.

Mantan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Sumarsono, Rabu (14/9),

menguraikan, sosok yang akan menjadi penjabat gubernur DKI mesti memenuhi sejumlah syarat. Dari syarat administrasi, sosok penjabat harus dari eselon I.

Melihat syarat ini, ketiga nama yang diusulkan DPRD DKI Jakarta telah memenuhi syarat. "Dari TNI Polri saja ia bisa selama administrasinya eselon I," kata pengajar di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) ini.

Kriteria selanjutnya yang mesti dipenuhi adalah harus menguasai teknis kompetensi pemerintahan. Wajib dipahami Jakarta memiliki banyak problem terkait program, anggaran, serta keuangan. Penjabat gubernur DKI harus tahu persis mekanisme perencanaan, pemrograman, dan sistem penganggaran.

Gubernur yang kurang menguasai hal ini, menurut Sumarsono, membuat munculnya gesekan dengan DPRD DKI. Itu terlihat dari era Gubernur Basuki Tjahaja Purnama hingga gubernur yang sekarang, Anies Baswedan.

"Jadi dewan itu membutuhkan yang namanya eksekutor anggaran yang andal," kata Sumarsono.

Sosok penjabat gubernur, menurut dia, juga mesti memiliki kemampuan manajerial. Ini berarti dapat mengelola hubungan dengan forum koordinasi pimpinan daerah (forkopimda), hubungan eksekutif-legislatif, mengelola forum kesatuan umat beragama, mengelola konflik sosial politik yang terjadi, mengelola krisis, dan mengelola kepentingan pilar keempat demokrasi, yaitu media.

Termasuk di dalamnya merawat hubungan verti-

kal-horizontal. Hubungan vertikal tentu saja dengan Presiden. Karena gubernur adalah kepanjangan tangan Presiden, harus bisa memastikan keberhasilan visi dan misi nasional. Salah satu agenda itu adalah pemindahan Ibu Kota Negara (IKN).

Hubungan horizontal dengan DPRD dan dengan rakyat harus dijaga. "Jakarta sangat dinamis. Kemampuan komunikasi publik sangat dituntut di samping kemampuan kompetensi pemerintahan," kata Sumarsono lagi.

Menurut dia, penilaian yang diberikan DPRD DKI kepada ketiga nama calon penjabat gubernur cukup rasional. Heru Budi mendapat sembilan suara, Marullah sembilan suara, dan Bahtiar enam suara.

Heru Budi dengan latar belakang pernah mengelola keuangan dan aset DKI, juga pernah dua kali menjadi wali kota, dinilai Sumarsono, memenuhi teknis kompetensi ini.

Marullah pernah menjabat wali kota, tetap belum pernah mengurus keuangan, menghitung anggaran. Sementara Bahtiar lebih berpengalaman di politik.

"Jakarta tidak bisa kita dekati hanya secara politik, tetapi profesionalisme harus dikedepankan karena persoalan-persoalan riilnya itu," kata Sumarsono.

Apabila aspirasi dewan diakomodasi presiden akan didapat penjabat gubernur terbaik serta idaman dewan dan rakyat. Meski begitu, Sumarsono mengingatkan dewan, agar melakukan evaluasi di akhir tahun pertama kepada penjabat gubernur nanti.